
KOMUNIKASI INTERPERSONAL PEMUKA ADAT DENGAN CALON LEGISLATIF DALAM KONTESTASI PEMILU 2024

Oleh
Delpa
Universitas Perintis Indonesia
E-mail: starring342014@gmail.com

Article History:

Received: 18-04-2023

Revised: 18-05-2023

Accepted: 22-05-2023

Keywords:

Agama, Tradisi,
Komunikasi
Interpersonal

Abstract: *Seiring dengan maraknya individu ikut berkontribusi mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg) dalam kontestasi politik pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah memberi dampak yang signifikan terhadap wibawa atau ikon religius yang menjadi panutan kaumnya dalam masyarakat. Sikap dan perbuatan para pemuka adat yang menghadiri hampir setiap kegiatan Caleg menimbulkan persepsi negatif terhadap pemuka adat terkait. Kedudukan pemuka adat yang semula menjadi panutan mulai tergugat karena sikap dan perilaku yang ambigu terhadap Caleg yang akan diusung dalam kaumnya. Metodologi penelitian dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, metode mengumpulkan data menggunakan wawancara secara mendalam (In depth interview) terhadap beberapa informan. Kedua, metode pemilihan informan menggunakan kaedah Snowball di mana informan pertama sebagai informan kunci. Informan pertama akan memberikan rekomendasi kepada pengkaji tentang siapa informan kedua, dan selanjutnya sampai ke informan terakhir. Informan terdiri dari 6 informan. 2 informan berasal dari kaum ibu sebagai bundo kanduang, 2 informan berasal dari kemenakan dan 1 informan berasal dari pemuka agama dan 1 informan berasal dari calon legislatif. Analisis kajian menggunakan kualitatif karena menggunakan pendekatan etnografi. Hasil temuan kajian mendapati bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya persepsi negatif oleh masyarakat terhadap pemuka adat karena sikap ketidakjelasan pilihan kandidat Caleg yang akan dipilih pemuka adat.*

PENDAHULUAN

Tradisi merupakan nilai budaya yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam sebuah masyarakat. Setiap tradisi atau adat dalam masyarakat tersebut dikepalai oleh kepala suku atau kepala kaum. Di Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya di Kecamatan Lengayang terdapat lebih kurang 50 kepala suku yang memegang gelar masing-masing. Mereka yang terpilih akan melalui proses resepsi acara "Batagak Gala" yang mendapatkan legal aspek dari organisasi adat KAN. Menurut Navis (1984), kepala adat yang terpilih dan diresmikan melalui acara "Malewakan Gala" merupakan individu yang

merupakan representasi individu yang terbaik dari sukunya. Definisi terbaik ini mencakupi makna yang luas. Namun semiotika yang sederhana dari kosakata ini mengacu kepada individu yang memiliki pemahaman adat, mampu dari segi ekonomi dan memiliki kepribadian yang tidak tercela. Artinya, individu yang memegang gelar adat dalam kaumnya merupakan kelompok sosial yang baik dari agama, baik secara perilaku, memiliki ilmu pengetahuan yang pada akhirnya sikap dan perbuatannya dapat dijadikan sebagai panutan atau contoh yang perlu diikuti oleh kaumnya dalam sebuah masyarakat.

Terpilihnya pemuka adat kategori pemegang gelar ini lazimnya orang yang memiliki pengaruh dalam sebuah masyarakat. Keterlibatan pemuka adat tersebut dalam komunikasi interpersonal dengan calon legislatif (Caleg) dalam politik kontestasi pemilihan umum (PEMILU) telah menggugat eksistensi wibawa pemuka adat bersangkutan. Ironisnya, keterlibatan pemuka adat tersebut tidak hanya melibatkan satu Caleg saja. Akan tetapi, pemuka adat tersebut telah menghadiri dan memenuhi undangan hadir dalam berbagai partai yang secara tidak langsung telah melahirkan persepsi negatif oleh kaum terhadap pemuka adat yang bersangkutan.

Menurut Gillin dan Gillin (1954), kepemimpinan (leadership) yang dimiliki individu memiliki pengaruh atas perilaku dan tindakan yang diambilnya. Individu yang memegang jabatan strategis memiliki efek yang relatif besar terhadap pengikutnya. Bilamana perbuatan yang dilakukan dianggap salah oleh pengikutnya maka sisi negatif akan terdampak oleh pengikut lainnya. Sedangkan sikap dan tindakan yang bersifat positif maka hal demikian akan memperkuat opini tentang sisi positif dari pemilik jabatan. Bahkan pemilik jabatan memiliki pengaruh yang besar terhadap panutannya yang secara tidak langsung pemilik jabatan memiliki kekuasaan dalam menentukan dan mempengaruhi pengikutnya. Individu yang memiliki jabatan sebagai pemegang gelar adat tentunya memiliki pengaruh yang besar sehingga bentuk keterlibatan pemuka adat membangun komunikasi interpersonal dengan beberapa Caleg memberikan indikasi yang signifikan terhadap kaumnya sendiri. Ada kecenderungan bahwa kaum dalam sebuah etnis memiliki loyalitas yang tinggi terhadap orang yang memegang gelar karena kaumnya mengharapkan agar kebijakan dan pilihan yang dipilih oleh pemimpinnya akan memberikan sisi positif terhadap pengikutnya.

Pada dasarnya setiap tindak tanduk dan sikap pemuka adat yang memegang gelar adat akan diikuti oleh kaum atau kemenakan yang berada di dalam satu kaum (paruik). Dengan ramainya Caleg yang berasal dari satu kaum yang sama menyebabkan pemuka adat yang memegang gelar adat mendapat undangan menghadiri kampanye masing-masing kader partai Caleg. Hal ini menyebabkan pemuka adat tersebut ikut terlibat menghadiri kegiatan Caleg. Hal ini menimbulkan persepsi negatif oleh kaum terhadap pemuka adat. Mereka menilai pemuka adat tidak memiliki komitmen yang jelas dalam menentukan pilihannya terhadap Caleg. Keterlibatan pemuka adat yang cenderung membangun komunikasi interpersonal dengan Caleg menyebabkan pengikutnya yang berasal dari kemenakan atau kaumnya mengalami kesukaran dalam menentukan pilihan Caleg yang akan dipilihnya.

LANDASAN TEORI

Kajian ini menggunakan teori kekuasaan yang menekankan tentang bagaimana individu melakukan upaya-upaya dalam mengekalkan kekuasaannya. Tidak jarang pula tindakan yang dilakukannya telah berseberangan dengan kebijakan yang ada. Bahkan

kebijakan yang dilakukannya lebih cenderung untuk kepentingan pribadinya. Dalam teori kekuasaan oleh Max Weber menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan alat yang memiliki legitimasi yang sah dalam mengambil suatu keputusan dalam sebuah masyarakat. Kekuasaan tersebut adakalanya dapat bersifat memaksa dalam “melanggengkan” tujuan dan cita-citanya (*Personal Power*).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dibedakan menjadi tiga bagian. Pertama, kaedah pengumpulan data menggunakan kaedah wawancara secara mendalam (*In-depth interview*) terhadap 8 orang informan. Kedua, kaedah pemilihan informan menggunakan kaedah *Snowball* dimana informan pertama sebagai informan kunci dalam penelitian. Sedangkan informan kedua berasal dari rekomendasi informan pertama. Untuk informan ketiga direkomendasikan oleh informan kedua dan selanjutnya sampai ke informan ke delapan. Adapun pembagian informan dalam kajian ini antara lain. 2 informan berasal dari pemuka adat. 2 informan berasal dari kaum ibu-ibu kaum. 2 informan berasal dari kaum bapak-bapak dalam satu kaum. 2 orang informan berasal dari kemenakan dalam kaum. 2 informan berasal dari calon legislatif kontestasi politik 2024. Ketiga, analisa kajian menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan pendekatan etnografi dengan menerapkan partisipan observasi dalam pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan pemuka adat dalam memainkan peranan penting dalam masyarakat adat. Hampir setiap sikap dan perilaku pemuka adat dijadikan sebagai standarisasi bagi kaumnya sendiri. Sehubungan dengan itu, individu yang terpilih sebagai pemuka adat yang memegang gelar adat merupakan individu yang terbaik dari kaumnya. Biasanya individu tersebut memiliki ilmu pengetahuan dan cara pandang yang luas tentang adat sehingga hampir setiap persoalan yang dihadapi kemenakan perlu melalui pemuka adat. Selain dari itu, pemuka adat juga memiliki pengaruh yang besar sehingga individu yang terpilih sebagai pemegang gelar dapat memberikan solusi ekonomi terhadap kemenakan dan kaumnya. Secara ringkasnya, pemuka adat yang memegang gelar adat merupakan individu yang menjadi *rule model* yang menjadi panutan kaumnya sehingga hampir setiap sikap dan perilaku pemuka adat dijadikan sebagai trend kekinian dalam sebuah kaum. Dalam kajian ini penulis akan memaparkan tiga sub pembahasan antara lain kedudukan pemuka adat dalam kaumnya, dampak komunikasi interpersonal pemuka adat dengan Caleg terhadap kaumnya dan langkah dan strategi oleh kaum memilih calon pemuka adat yang ideal dalam kaumnya.

Kedudukan pemuka adat dalam kaumnya

Pemuka adat yang memegang gelar adat merupakan individu yang merupakan perwakilan dari suatu kaum yang tidak hanya sekedar menyandang gelar kebesaran adat dari kaumnya. Yang bersangkutan juga memiliki tanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan kaumnya. Menurut Malik (2016), individu yang terpilih sebagai pemegang gelar adat cenderung berasal dari kalangan keluarga yang memiliki kekuatan finansial sehingga ada kecenderungan bahwa pemuka adat tersebut merupakan tempat mengadu nasib bagi kaumnya. Senada dengan itu, acara malewakan gala dalam pengangkatan pemuka adat yang baru biasanya menelan biaya yang relatif besar sehingga individu yang terpilih

sebagai pemuka adat yang menyandang gelar berasal dari kalangan keluarga yang bersedia untuk memberikan aspek kesejahteraan kaumnya.

Kedudukan pemuka adat yang memegang gelar merupakan kelompok individu yang mulia. Mereka dijadikan sebagai tolak ukur utama dalam bertingkah laku dan beretika dalam sebuah masyarakat. Dengan pertuturan bahasa yang halus serta corak perilaku yang santun dan tidak jarang pula di antara kaumnya menjadikan setiap perilaku dan tindakannya sebagai sesuatu yang dianggap kultus. Menurut Navis (1984), kondisi masyarakat adat yang masih kental memegang nilai dan tradisi secara konsisten dalam kehidupannya. Masyarakat adat yang mayoritasnya masih berpegang teguh kepada sistem tradisi memberikan penghormatan kepada kaum laki-laki dalam kaumnya, disebut niniak mamak. Kalangan niniak mamak dalam masyarakat Minang memiliki kedudukan yang istimewa di mana hampir segala bentuk sikap dan perbuatannya dijadikan sebagai standar dalam penilaian. Apatah lagi pemuka adat yang memegang gelar adat yang tentunya kedudukan mereka tergolong tinggi dalam sebuah kaumnya.

Berbagai bentuk persoalan dan kemelut sosial yang terjadi dalam kaum juga bermuara kepada pemuka adat sebagai pemegang kenali. Konflik sengketa kekerasan rumah tangga ataupun peristiwa pelanggaran di jalan raya kerap kali diselesaikan menggunakan pendekatan adat. Melalui proses mediasi yang dilakukan oleh para pemuka adat beserta niniak mamak dapat menyelesaikan masalah secara bijaksana tanpa perlu menggunakan undang-undang pemerintah. Menurut Rozi (2013), proses perundingan berbasiskan adat seringkali dijadikan sebagai prioritas dalam menanggapi dan merespon terhadap konflik sosial dalam sebuah masyarakat. Bahkan bentuk penyelesaian ini terkesan tidak memberikan efek negatif terhadap corak hubungan komunikasi dan interaksi antar pihak berkonflik. Dengan menerapkan proses mufakat yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang menjadi langkah utama dalam penyelesaian persoalan sosial. Pelaku utama dalam menyelesaikan proses perdamaian atas masalah tersebut dilakoni oleh pemuka adat yang memegang gelar dalam suatu kaum. Artinya, pemuka adat yang memegang gelar adat memiliki adil yang relatif besar terhadap langkah penyelesaian konflik sosial dalam kaumnya.

Pemuka adat (traditional leader) memiliki kedudukan sebagai pewaris utama tradisi dalam masyarakat Minang. Kepada mereka lah harapan dan cita-cita disandarkan tentang kelestarian eksistensi sebuah tradisi. Menurut....(2020), generasi muda merupakan kelompok sosial yang memainkan peranan dalam mewarisi tradisi secara berterusan yang dikomandoi oleh pemuka adat yang memegang gelar. Jatuh bangunnya sebuah tradisi terletak pada bagaimana gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pemuka adat. Senada dengan itu, Saroni (2018), hubungan komunikasi interpersonal oleh pemuka adat dengan generasi muda yang dibangun berbasiskan adat akan menghasilkan generasi muda yang tangguh dalam mewarisi tradisi pada masa depan, atau sebaliknya.

Seiring dengan masuknya tahun Pemilu 2024 di Indonesia, masyarakat Minang terutama suku dan kaum di Kecamatan Lengayang memiliki kecenderungan mengikuti bentuk pilihan yang dilakukan oleh pemuka adat. Menurut....(2020) mayoritas masyarakat pedesaan terutama di masyarakat yang bermukim di daerah kategori Instruksi Desa Tertinggal (IDT) memiliki sikap fanatik terhadap gaya kepemimpinan sosok pemuka adat. Sikap sukuisme dan etnisitas yang kuat di kalangan suku atau kaum di daerah IDT meyakini

bahwa pilihan atau hak suara sosok pemuka adat akan memberikan kesejahteraan dan harapan kepada kaumnya. Dengan kedudukan pemuka adat adalah “segalanya” bagi kaum dan suku maka bentuk komunikasi interpersonal yang dibangun oleh pemuka adat dengan Caleg telah menggugat kedudukan sang pemegang gelar adat di dalam kaumnya. Seolah-olah pemuka adat yang dianggap sebagai sesuatu yang “sakral” berubah menjadi sesuatu yang tidak perlu diagung-agungkan lagi.

Pemuka adat yang memegang gelar adat memainkan peranannya sebagai sentral dalam pengambilan keputusan. Kedudukan mereka yang merupakan *influencer* dapat memberikan “sugesti” terhadap kaumnya sehingga hampir setiap perilaku dan sikap pemuka adat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Kajian oleh Daryusti (2006), corak perkawinan sesama suku merupakan sebuah larangan dalam suatu masyarakat. Bilamana amalan perkawinan sesama suku tersebut telah dilaksanakan oleh pemuka adat maka kaumnya akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti karena kebijakan tersebut dianggap sebagai keputusan yang boleh dilanggar. Dengan demikian, setiap perilaku dan perbuatan pemuka adat perlu dipelihara dan dijauhi dari bentuk tindakan yang menyalahi hukum adat karena kaum dalam suatu masyarakat akan menilai dan memberikan justifikasi terhadap pemimpin adat itu sendiri.

Dengan terpilihnya seseorang menjadi pemuka adat yang memegang gelar adat seyogyanya yang bersangkutan perlu mewaspadaikan segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan beragam interpretasi dan argumentasi tentang sikap dan perbuatan pemuka adat tersebut. Bilamana dikaitkan dengan adanya keterlibatan pemuka adat dalam komunikasi interpersonal dengan calon legislatif dan tentunya hal demikian memberikan penilaian negatif oleh kaumnya. Penilaian negatif terhadap pemuka adat tersebut merupakan bentuk keruntuhan nilai moral yang dimiliki oleh seorang pemuka adat. Hal ini menjelaskan betapa agungnya kepribadian seorang pemuka adat bagi kaumnya sendiri.

Dampak komunikasi interpersonal pemuka adat dengan Caleg terhadap kaumnya

Calon legislatif memiliki berbagai strategi untuk meraih suara dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satu bentuk pendekatan yang lazim dilakukan oleh Caleg yakni dengan mengundang seluruh anggota masyarakat menghadiri jamuan makan bersama di rumah Caleg. Bahkan Caleg juga akan mengundang para pemuka adat baik yang pemuka adat yang memegang gelar atau pun pemuka adat yang tidak memegang gelar adat. Cara atau strategi ini dianggap berkesan untuk mengumpulkan warga sehingga ramai di kalangan Caleg menerapkan metode pengumpulan warga melalui acara jamuan makan.

Terdapat beberapa acara dalam kegiatan tersebut di antaranya seperti acara penyampaian visi misi partai, acara permintaan dukungan suara, acara strategi pemenangan Caleg, acara makan bersama dan doa bersama. Acara penyampaian visi misi partai akan dipaparkan oleh tim pemenangan Caleg yang menekankan kepada bentuk program yang akan ditujukan kepada masyarakat. Kedua, acara permintaan dukungan suara biasanya akan disampaikan secara langsung oleh calon anggota legislatif itu sendiri. Caleg akan menjelaskan secara detail apa bentuk upaya yang akan diberikan kepada masyarakatnya untuk periode 5 tahun ke depan. Selanjutnya, acara strategi pemenangan Caleg akan memaparkan tentang permintaan khusus dilakukan oleh Caleg dan anggota tim pemenangan partai kepada pemuka adat yang memegang gelar untuk bersedia berkontribusi dalam perolehan suara Caleg. Terakhir acara makan bersama dan ditutup dengan doa bersama.

Keterlibatan anggota masyarakat dalam acara jamuan makan yang diundang oleh Caleg merupakan hal yang umum sehingga terkesan tidak memberikan efek negatif terhadap kaum atau suku dalam sebuah masyarakat. Akan tetapi, keterlibatan pemuka adat terutama individu yang memegang gelar adat dalam acara jamuan makan yang dilaksanakan oleh pemuka adat dapat memberikan efek yang besar terhadap kaum atau suku yang menjadi pengikutnya. Ironisnya, pemuka adat akan menghadiri jamuan makan yang diundang oleh berbagai Caleg sehingga hal demikian menyebabkan terjadinya bentuk komunikasi interpersonal antara pemuka adat dengan Caleg yang secara tidak langsung dapat menimbulkan berbagai interpretasi oleh kaum atau suku pengikutnya. Kehadiran pemuka adat dalam acara jamuan makan yang diadakan oleh beberapa Caleg memperlihatkan adanya model komunikasi interpersonal yang dibangun antara pemuka ada bersama Caleg. Tentunya kondisi ini dapat melahirkan persepsi negatif oleh kaum atau sukunya terhadap perilaku atau sikap pemuka adat yang memegang gelar.

Menurut McQuail (2010), komunikasi interpersonal merupakan model komunikasi yang dibangun antar individu dengan individu dalam sebuah masyarakat. Model komunikasi interpersonal menekankan kepada aspek pembahasan yang terjadi dalam satu arah. Artinya, sebuah pembahasan yang disampaikan oleh individu A kepada individu B terkait tawaran, permintaan maupun penolakan. Biasanya komunikasi interpersonal hanya melibatkan antar individu di mana individu akan menerima atau menolak suatu tawaran. Senada dengan itu, corak komunikasi interpersonal yang apabila individu A menerima tawaran dari individu B maka alur atau proses komunikasi interpersonal akan terjadi kian efektif. Manakala corak komunikasi interpersonal yang mengacu kepada penolakan maka komunikasi interpersonal antar individu tidak berjalan secara efektif.

Dalam kontestasi politik biasanya tawaran terhadap perolehan suara tidak terlepas dari politik uang. Menurut Istiqomah dan Widiyanto (2020), politik uang merupakan bentuk pendekatan yang dianggap efektif meraih “kepastian” perolehan suara dimana tingkat kepatuhan individu untuk mengikuti permintaan dari pelaku berbanding lurus dengan jumlah nominal uang. Sedangkan rendahnya jumlah nominal uang yang diberikan oleh pelaku memiliki kecenderungan berbanding terbalik dengan perolehan suara. Senada dengan itu, model komunikasi interpersonal juga dapat memberikan ruang dan peluang kepada pelaku untuk tetap memilih individu tanpa dipengaruhi perilaku politik uang. Hal ini disebabkan karena pendekatan komunikasi interpersonal telah memberikan jembatan penghubung untuk menerima tawaran atas gagasan atau ide yang disampaikan pelaku.

Proses komunikasi interpersonal Caleg dengan pemuka adat seringkali memberikan dampak positif karena setiap pemuka adat yang memiliki gelar adat memiliki pengaruh yang signifikan dalam sebuah kaumnya. Ketika Caleg berhasil memberikan tawaran kepada pemuka adat melalui komunikasi interpersonal maka kaum atau suku yang dimiliki oleh pemuka adat memiliki kecenderungan mengikuti pilihan dari pemuka adat sebagai pucuk pimpinan tertinggi mereka. Sehubungan dengan itu, para Caleg berusaha untuk membangun komunikasi interpersonal secara efektif dengan tujuan agar dapat meraih simpatisan pendukung dari kaumnya. Tidak jarang pula pendekatan ini ramai diterapkan oleh para Caleg karena tidak perlu menerapkan politik uang sepertimana dilakukan oleh para kandidat politik yang berorientasi politik uang.

Tingginya tingkat peminatan para Caleg membangun komunikasi interpersonal dengan pemuka adat menyebabkan pemuka adat sering dijadikan sasaran oleh para Caleg. Ramainya para Caleg membangun komunikasi interpersonal dengan pemuka adat justru menyebabkan kaumnya merasa “resah” karena pemuka adat yang mereka “dahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang” tidak lagi dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan pilihan suara dalam kontestasi politik 2024 nantinya. Pengakuan informan menjelaskan mereka merasa dikhianati oleh pemuka adatnya sendiri karena seringnya pemuka adat dikunjungi oleh para Caleg untuk meminta dukungan suara. Perihal demikian menyebabkan kaum atau suku dalam masyarakat tidak memiliki kepastian untuk memilih Caleg mana yang akan memberikan manfaat kepada mereka untuk lima tahun kedepannya.

Langkah dan strategi oleh kaum memilih calon pemuka adat yang ideal dalam kaumnya.

Pemuka adat tidak hanya sekedar pemimpin dalam sebuah kaum. Akan tetapi terkandung makna yang mendalam terhadap individu yang memegang gelar adat berkenaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan beberapa langkah atau strategi dalam memilih pemuka adat pemegang gelar. Pertama, individu pemegang gelar adat perlu memiliki kesadaran yang mendalam untuk menjaga nasib ekonomi kaumnya. Menurut informan menjelaskan bahwa pemuka adat pemegang gelar memiliki kecenderungan mapan dari segi finansial sehingga mereka kerap menjadikan pemuka adat sebagai tempat mengadu keuangan. Sesuai dengan pepatah Minang menjelaskan bahwa pemuka adat pemegang gelar adat seumpama kayu gadang (pohon besar) yang dijadikan sebagai tempat berlindung. Biasanya hal ini terpapar dalam aktivitas pernikahan atau pesta di mamak pemuka adat pemegang gelar akan menjadi solusi atas kendala keuangan dalam menyelenggarakan acara berkenaan.

Keterlibatan pemuka adat dalam hal bantuan finansial tersebut secara tidak langsung akan memberikan nilai prestise tersendiri bagi pemuka adat. Pada dasarnya pemuka adat tergolong orang yang memiliki nilai prestise yang kuat dalam kaumnya. Keterlibatan pemuka adat dalam komunikasi interpersonal beberapa Caleg secara tidak langsung telah memberikan dampak negatif terhadap prestise dan wibawa pemuka adat berkenaan. Menurut Malik (2016), sebuah masyarakat pedesaan yang masih kental memegang teguh nilai-nilai lama memiliki loyalitas yang kuat terhadap pemimpin adat. Masyarakat pedesaan yang dikenali dengan sikap gotong royong dan semangat perkauman yang relatif kuat memberikan kontribusi yang besar pula terhadap arah tuju pilihan pemuka adat. Seiring dengan ketidakjelasan hak suara yang akan dipilih oleh pemuka adat tentunya dapat memberikan makna negatif terhadap karakter pemuka adat itu sendiri.

Manakala masyarakat perkotaan memiliki keberagaman etnis dan budaya sehingga loyalitas kaum terhadap pemuka adat berbeda dengan masyarakat pedesaan. Pendapat Errington (1984), masyarakat yang bermukim di kota memiliki berbagai bentuk keberagaman pilihan hidup sehingga semangat perkauman dan kekentalan dalam penerapan nilai-nilai lama seperti adat kurang menjadi perhatian. Hal ini disebabkan banyaknya nilai-nilai budaya baru yang telah diadaptasikan dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang pada prinsipnya telah mengurangi penerapan nilai-nilai adat atau tradisi dalam kehidupan. Bahkan sikap dan perilaku pemuka adat dengan beberapa Caleg tidak menjadi perhatian serius bagi masyarakat perkotaan karena loyalitas masyarakat adat di perkotaan telah mengalami pergeseran nilai. Menurut Setiyadi (2016), modernisasi dan globalisasi pada dasarnya telah membawa nilai-nilai budaya Barat menggantikan nilai-nilai tempatan.

Pemilik budaya merasa terasing dengan nilai budayanya sendiri. Lama-kelamaan nilai-nilai budaya asing dapat menggantikan nilai budaya tempatan yang sewajarnya diberikan tumpuan untuk dipelihara.

Kedua, pemuka adat yang akan dipilih adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang adatnya. Kurangnya pemahaman dan kecintaan pemegang gelar adat terhadap adatnya menyebabkan individu cenderung menghindari kegiatan-kegiatan perkauman. Bahkan tidak jarang pula pemegang gelar berdomisili jauh dari kaumnya sehingga jarang terjadi komunikasi dan interaksi sosial yang efektif. Menurut Daryusti (2006), domisili pemegang gelar yang jauh dari kampung halamannya menyebabkan pemuka kaum dan adatnya tidak terurus secara maksimal. Dengan demikian, pemegang gelar yang terpilih perlu memiliki sikap etnosentrisme dan perkauman (etnisiti) terhadap kaumnya.

Dengan tingginya kesadaran dan kecintaan pemuka adat terhadap kaumnya maka setiap kebijakan atau pilihan yang akan dipilih dalam kontestasi politik ini idealnya berpihak kepada kepentingan kaumnya. Menurut Damsar (2005), individu yang terpilih sebagai pemegang gelar adat seyogyanya memiliki perhatian yang tinggi terhadap kaumnya. Hal ini dibuktikan dengan sikap rela berkorban oleh pemuka adat demi membela kepentingan kaumnya. Tentunya dalam pesta politik Pemilu 2024 ini dapat memberikan harapan yang besar dilakukan oleh pemuka adat untuk kepentingan kaum. Harapannya pemuka adat membangun komunikasi interpersonal dengan calon legislatif bertujuan untuk kesejahteraan kaumnya.

Ketiga, pemegang gelar perlu memiliki pendirian yang kukuh dalam pengambilan keputusan. Kaumnya merasa kecewa karena dengan adanya sikap dan perilaku pemegang gelar yang terlibat dalam komunikasi interpersonal dengan beberapa Caleg dianggap tidak memiliki pendirian yang jelas. Hal ini memperlihatkan pemegang gelar adat telah diwarnai oleh karakter materialisme. Menurut modernisasi telah membawa nilai-nilai budaya Barat seperti materialisme. Nilai materialisme menyebabkan seseorang cenderung melakukan pengumpulan kekayaan dan tidak jarang pula dilakukan secara cara yang salah seperti mencuri atau pun melakukan penipuan. Dengan adanya bentuk sikap dan perbuatan yang terlalu berorientasi kepada materialisme menyebabkan seseorang cenderung melakukan bentuk perbuatan yang menyimpang. Bentuk perbuatan menyimpang merupakan upaya dilakukan untuk mempercepat meraih keuntungan. Hal ini menyebabkan individu lebih mengagung-agungkan kekayaan dibandingkan dengan amanah yang diberikan sebuah masyarakat. Menurut Berry (1965), sikap terlalu memberikan skala prioritas berlebihan terhadap sebuah kekayaan menyebabkan individu menjadi lebih mementingkan diri sendiri dari kaumnya sendiri.

Teori materialisme memberikan penekanan tentang adanya sikap atau perilaku yang lebih memberikan skala prioritas finansial sebagai motif utama. Sikap dan perbuatan yang cenderung didasari oleh faktor keuangan menyebabkan individu atau kelompok sosial melakukan kebijakan atau perilaku yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Sikap pemegang gelar yang telah membangun komunikasi interpersonal dengan beberapa Caleg memperlihatkan adanya motif finansial yang menjadi skala prioritas demi kepentingan pribadinya sebagai individu yang memiliki pengaruh dalam sebuah masyarakat. Caleg memiliki kecenderungan untuk mencari dan mendekati seramai mungkin individu yang berperan sebagai pemegang gelar. Hal ini bertujuan agar Caleg dapat meraih suara banyak

dari berbagai kaum atau suku. Pendekatan ini biasanya diwarnai dengan memberikan sejumlah material uang kepada pemegang gelar. Ironisnya, pemegang akan menerima pemberian dari berbagai Caleg sehingga muncul persepsi bahwa individu yang berperan sebagai pemegang gelar dianggap tidak memperlihatkan ciri kepemimpinan yang berbasis nilai adat dan agama dalam sebuah kaum atau suku. Pendapat Soekanto (1994), sikap atau perbuatan yang berorientasi kepada nilai material memperlihatkan bentuk sikap kepemimpinan (leadership) yang tidak dapat dijadikan sebagai panutan (rule model) dalam sebuah masyarakat. Kepemimpinan perlu memiliki sikap ketaatan dan kepatuhan dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan nilai patriotisme dan sikap nasionalisme dalam masyarakat. Sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri merupakan bentuk cari corak kepemimpinan yang cenderung bersifat materialisme.

Pada hakikatnya keterlibatan pemuka adat membangun komunikasi interpersonal dengan banyak Caleg merupakan sesuatu yang wajar. Hal ini disebabkan pemuka adat sebagai pemegang gelar tidak terlepas dari keterlibatannya dengan berbagai lapisan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang beragam pula. Akan tetapi, kehadiran pemuka adat dalam ajang kampanye politik dalam pemenangan suara partai politik adalah menjadi sesuatu yang dinilai negatif oleh kaumnya. Menurut Sibarani (2013) tim pemenangan politik secara umumnya adalah berasal dari kalangan individu atau kelompok sosial yang menjadi basis perolehan suara dalam kontestasi politik.

KESIMPULAN

Pemuka adat sebagai pemegang gelar adat merupakan ikon dan representasi dari kaum atau suku dalam masyarakat. Sikap dan perilaku pemegang gelar adat dalam membangun komunikasi interpersonal dengan banyak Caleg telah memberikan persepsi negatif oleh kaum terhadap individu pemegang gelar adat. Arus modernisasi telah membawa nilai budaya materialisme sehingga telah mewarnai sikap dan perilaku pemegang gelar sarat dalam membangun komunikasi interpersonal dengan calon legislatif dalam kontestasi politik 2024 nantinya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdul GK (2003) *Kompleksitas persoalan otonomi daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [2] Abdullah I. 2002. *Desentralisasi, globalisasi dan demokrasi lokal: Diversity budaya, hak-hak budaya daerah dan politik lokal di Indonesia*. LP3ES, Jakarta.
- [3] Atkinson, Paul., Hammersley, Martyn. 2019. *Ethnography: Principles in practice*. Routledge.
- [4] Attubani, Riwayat. 2017. *Pepatah Petitih dan Adat Minangkabau*. Padang: Createspace
- [5] Berry, B. 1965. *Race and ethnic relations*. Bostony: Houghton Mifflin.
- [6] Boas, F. 1940. *Race, language and culture*. New York: Double-day
- [7] Daniel EM. 2006. *Kebangkitan peran budaya*. LP3ES, Jakarta. Terj.
- [8] Daryusti. 2006. *Hegemoni penghulu dalam perspektif budaya*. Pustaka, Yogyakarta.

- [9] Damsar (2005) *The Perception of the problem of local autonomy: Response of West Sumatera to the implementation of the law no.22/ 1999*. Universitas Andalas Press, Padang.
- [10] Errington, F.K. 1984. *Manners and Meaning in West Sumatra. The Social Context of Consciousness*. New Haven, London: Yale University Press.
- [11] Foley, A.W. 1997. *Anthropological Linguistics and Introduction*. University of Sydney: Blackwell Publisher
- [12] Gillin JL, Gillin JP. 1954. *A revision of an introduction to sociology*. The Macmillan Company, New York.
- [13] Giddens A. 1991. *Modernity and self-Identity: Self and society in the late modern age*. Cambridge Polity Press, New York.
- [14] Istiqomah, A., & Widiyanto, D. 2020. *Ancaman Budaya Pop (Pop Culture) Terhadap Penguatan identitas nasional Masyarakat Urban*. Jurnal Kalacakra , 1(1), 18–24.
- [15] Malik, Rahman. (2016). Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan sebagai Wujud Warga NKRI. *Jurnal Analisis Sosiologi*, 5(2).
- [16] McQuail, Dennis. 2010. *Mass Communication Theory*. London: Sage Publication.
- [17] Nasution, R. D. 2017. *Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi terhadap Perubahan Sosial Budaya Di Indonesia*. Jurnal Penelitian 39 Komunikasi Dan Opini Publik, 21(1), 30–42.
- [18] Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Temprint.
- [19] Rozi, S. 2013. *Konstruksi identitas agama dan budaya etnis minangkabau di daerah perbatasan: perubahan identitas dalam interaksi antar etnis di rao kabupaten pasaman sumatera barat*. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 215–245.
- [20] Santosa, R. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kebahasaan*. Surakarta. UNS Press
- [21] Setiyadi, Tulus. 2016. *Menelusuri Jejak Tradisi Membangun Jati Diri*. Madiun: CV Raditeens
- [22] Saroni, S. 2018. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah*. Aviasi: Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan, 15(1), 47–75. <https://doi.org/10.52186/aviasi.v15i1.5>
- [23] Sibarani, Robert. 2013. *Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kearifan lokal Sebagai Identitas Bangsa*. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks> 552 “Ethnicity and Globalization”
- [24] Soekanto, Soerjono. (1994). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [25] Spradley, James. P. 2016. *Participant Observation*. USA: Waveland Press, Inc.
- [26] Wallace AFC. 1966. *Religion: An anthropological view*. Random House, New York.
- [27] Widlok, Thomas. 2017. *Anthropology and the Economy of Sharing*. Routledge: Taylor & Francis.